

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andi Softan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta 2014.
- Charles Himawan, *Hukum sebagai Panglima*, Buku Kompas, Jakarta 2003.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Efa Laila Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2009.
- Jack Donnely, “*Universal Human Rights in Theory and Practice*”, dalam Rhona K.M. Smith et.al. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.
- Jonathan Sarwano, *Metode Penelitian Kuantitatif & kualitatif*, Graha Ilmu Yogyakarta 2006.
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Ciputa PT.Tatanusa, 2012.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung 2009.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuha Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta 1991.

Surachmin dan Cahaya Suhandi, *Strategi & Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta 2011.

Sinta Dewi Rosadi, *Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung Refika Aditama, 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

C. Sumber Lain

1. Jurnal

Syaibatul Hamdi, Suhaimi, dan Mujibussalim, *Jurnal Ilmu Hukum Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*, Banda Aceh Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2013.

2. Hasil Interview

Wawancara dengan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung.

3. Website

<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/07/01/arya-abdi-effendy-dan-juard-effendi-divonis-2-tahun-3-bulan>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/409487-jaksa-putar-rekaman-cctv-penyerahan-suap-impor-daging>

<http://www.cctvpantura.com/2015/11/pengertian-cctv-dan-perangkat-perangkat.html>.

<http://www.ras-eko.com/2013/04/pengertian-closed-circuit-television.html>

<http://instalasi-jaringan.com/jenis-jenis-kamera-cctv/>

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>